TEOKRISTI
JURNAL TEOLOGI KONTEKSTUAL DAN PELAYANAN KRISTIANI
Vol 05, No 01, Mei 2025; 15-28
e-ISSN 2797-1651
Available at: *e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jtk*

Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Teologi Kristen: Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Terkait Kelangkaan Minyak Goreng dan Gas

Daniel Pesah Purwonugroho[1]
danielpesahedu@gmail.com

Abstract:

This paper is written to criticize government policies related to scarcity of cooking oil and gas. The criticism is based on economic justice in the perspective of Christian theology. Christian theology provides a perspective on social justice perspective that favors the poor. Christian ethics also highlights the correct and responsible distribution of resources. With the practice of this, the distribution of cooking oil and gas should be enjoyed by the Indonesian people, especially the poor. Fair and responsible distribution is the key to achieving social justice. Through a descriptive qualitative approach descriptive qualitative approach, the author tries to unravel economic justice in a Christian perspective. Christian perspective. The description will be useful to provide criticism for government policies related to the scarcity of cooking oil and gas.

Keywords: Economic Justice, Christian Theology, Government Policy, Cooking Oil, Gas

Abstrak:
Tulisan ini disusun untuk memberikan kritik kepada kebijakan pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng dan gas. Kritik tersebut berlandaskan keadilan ekonomi dalam perspektif teologi Kristen. Teologi Kristen memberikan sebuah perspektif keadilan sosial yang berpihak kepada rakyat miskin. Etika Kristen juga menyoroti distribusi sumber daya yang benar dan bertanggung jawab. Dengan pengamalan tersebut, semestinya distribusi minyak goreng dan gas dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia terutama rakyat miskin. Distribusi yang adil dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk mencapai keadilan sosial. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penulis mencoba mengurai keadilan ekonomi dalam perspektif Kristen. Uraian tersebut akan berguna untuk memberikan kritik bagi kebijakan pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng dan gas.

Kata kunci : Keadilan Ekonomi, Teologi Kristen, Kebijakan Pemerintah, Minyak Goreng, Gas

[1] Sekolah Tinggi Teologi Baptis, Semarang

PENDAHULUAN

Keadilan ekonomi merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ekonomi merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan sosial. Di dalam perspektif iman Kristen, keadilan ekonomi merupakan prinsip fundamental. Prinsip fundamental tersebut memberikan tekanan kepada kesejahteraan bersama untuk mencapai keadilan sosial. Alkitab menegaskan keadilan ekonomi bagi keadilan sosial. Adams menyatakan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menekankan keadilan dan perlakuan yang adil, terutama bagi orang miskin dan terpinggirkan. Hal ini terbukti dalam banyak bagian yang menganjurkan perlakuan yang adil dan perlindungan terhadap yang kurang menguntungkan secara ekonomi.[2] Alkitab sendiri memberikan perhatian yang khusus bagi masyarakat yang miskin dan terpinggirkan. Masyarakat miskin dan yang terpinggirkan adalah fokus dimana keadilan ekomoni harus merata. Keadilan ekonomi tidak memihak masyarakat kelas atas yang mampu dan untung secara ekonomi. Namun keadilan ekonomi melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang kurang beruntung secara ekonomi. Lebih lanjut lagi, Perjanjian Lama menegaskan tentang etika ekonomi Kristen. Garber menegaskan bahwa Perjanjian Lama berisi ajaran-ajaran tentang keadilan ekonomi yang sangat penting untuk mengembangkan etika ekonomi Kristen berdasarkan prinsip-prinsip alkitabiah.[3] Ada ajaran-ajaran mengenai keadilan yang diekspos di dalam Perjanjian Lama. Ajaran tersebut diekspos dengan tujuan membangun etika ekonomi. Etika ekonomi terbangun untuk mencapai keadilan yang bersifat alkitabiah. Selain itu, para teolog Kristen memberikan definisi tersendiri perihal keadilan ekonomi. Ostwald menyatakan bahwa keadilan ekonomi, seperti yang didefinisikan oleh para ekonom dan teolog Kristen, adalah sebuah panggilan untuk peduli terhadap orang miskin dan mendukung kebijakan publik yang didasarkan pada pandangan dunia yang Alkitabiah, menantang mereka yang memiliki pandangan dunia yang Alkitabiah untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi.[4] Perspektif Kristen dalam keadilan ekonomi menyuarakan hal yang urgent di dalam kehidupan masyarakat. Ketidaksetaraan ekonomi merupakan hal yang nyata dan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah panggilan penting untuk menaruh kepedulian terhadap orang miskin dengan cara menyusun kebijakan publik demi pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tersebut adalah langkah untuk mencapai sebuah keadilan ekonomi. Maka dari itu, teologi Kristen melihat keadilan ekonomi sebagai sesuatu yang fundamental untuk menekankan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kelangkaan bahan-bahan penting di dalam rumah tangga yaitu minyak goreng dan gas. Kelangkaan tersebut terbentuk karena adanya masalah distribusi dan regulasi. Masalah distribusi dan regulasi itu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Masyarakat ekonomi kelas bawah sangat terdampak oleh masalah tersebut. Dilansir dari kompas.com, ketersediaan Elpiji 3 kg mulai berkurang menyusul larangan yang diberlakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) terhadap pengecer yang menjual gas bersubsidi ini, efektif mulai 1 Februari 2025.[5] Elpigi 3 kg merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat terutama

---

[2] Samuel L Adams, "The Justice Imperative in Scripture," *Interpretation* 69, no. 4 (2015): 399–414, https://doi.org/10.1177/0020964315592131.

[3] David G Garber, "Justice or Wormwood: Foundations for Economic Justice in the Old Testament," *Review & Expositor* 110, no. 2 (2013): 271–83, https://doi.org/10.1177/003463731311000209.

[4] Connie Harris Ostwald, "Defining Economic Justice: A Christian Perspective," *Journal of Business, Technology and Leadership* 1, no. 1 (2019): 18, https://doi.org/10.54845/btljournal.v1i1.4.

[5] Kompas.com, "Kelangkaan Elpiji 3 Kg Dan BBM Di Indonesia, Pakar Ungkap Penyebabnya," www.kompas.com, 2025, https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/02/04/062600988/kelangkaan-elpiji-3-kg-dan-bbm-di-indonesia-pakar-ungkap-penyebabnya?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bottom_Desktop.

masyarakat miskin. Namun, pemerintah memberlakukan sebuah regulasi yang justru membuat elpiji 3kg ini menjadi langka. Alhasil, regulasi tersebut membawa kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan elpiji 3 kg.

Selain itu, pemerintah juga melakukan sebuah regulasi yang membawa kelangkaan minyak goreng. Aryanto menyatakan bahwa pihak berwenang Indonesia menghapus peraturan Harga Eceran Tinggi (HET) untuk minyak goreng pada Maret 2022 dalam upaya untuk mengurangi kekurangan dan meningkatkan kemampuan produksi lokal. Meskipun demikian, keputusan ini telah mengakibatkan kenaikan harga, berkurangnya aksesibilitas untuk populasi yang kurang beruntung secara ekonomi, dan peningkatan kerentanan terhadap perilaku kartel.[6] Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah tersebut justru memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat. Tantangan tersebut ialah harga minya goreng cenderung naik. Selain itu, akses minyak goreng menjadi langka. Dengan kata lain, kelangkaan minyak goreng serat ketersediaan elpiji 3kg terjadi karena adanya permasalahan regulasi yang mengatur distribusi kedua bahan tersebut sehingga terjadi permasalahan bagi masyarakat.

Kebijakan pemerintah tersebut perlu untuk diperhatikan secara serius. Perlu adanya kesadaran moral dan etis untuk menyusun sebuah kebijakan yang tidak problematik. Perspektif teologi Kristen memberikan sebuah sudut pandang baik secara moral dan etis terhadap kebijakan tersebut yang berdampak pada ketidakadilan sosial. Barrera menegaskan bahwa wacana teologis Kristen menggarisbawahi keadilan sosial dan penatalayanan sebagai prinsip fundamental dalam perumusan kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip ini mempromosikan pengelolaan sumber daya yang teliti dan alokasi kekayaan yang adil untuk menegakkan martabat dan kesejahteraan setiap individu.[7] Dalam menyusun regulasi demi kepentingan publik, perlu adanya pengelolaan yang sangat teliti. Pengelolaan yang teliti tersebut dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab dikarenakan adanya keterkaitan dengan kebutuhan banyak orang. Sumber daya seperti minyak dan gas perlu dikelola secara teliti dan hati-hati. Selain itu, perlu adanya diskusi yang melibatkan wakil lapisan masyarakat dalam rangka menyusun regulasi demi kepentingan masyarakat. Frimpong menyatakan bahwa teologi Kristen mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu publik, mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial dan kebaikan bersama.[8] Keterlibatan aktif dari wakil lapisan masyarakat diperlukan untuk mengadvokasi regulasi yang di tetapkan, dalam hal ini regulasi minyak goreng dan elpiji. Perlu adanya pengawasan yang serius dan sungguh-sungguh dalam penerapan regulasi agar tidak rentan dengan adanya dugaan korupsi dan penyelewengan kepentingan dalam distribusi minyak goreng dan elpiji. Maka dari itu, perspektif teologi Kristen menawarkan kritik moral dan etis terhadap kebijakan ekonomi yaitu perlu adanya pengelolaan sumber daya yang teliti dan hati-hati serta perlu adanya pengawasan bersama untuk mencegah munculnya ketidakadilan sosial.

Konsep keadilan ekonomi dapat diperhatikan melalui perspektif teologi Kristen. Teologi Kristen memberikan tekanan penuh kepada keadilan sosial. Bagaimana konsep keadilan ekonomi dalam teologi Kristen? Thinane menegaskan bahwa teologi Kristen menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi sebagai bagian integral dari misi Tuhan (missio Dei). Paradigma missio hominum mengintegrasikan tindakan manusia dengan tindakan ilahi untuk mencapai tujuan missio Dei, termasuk mewujudkan keadilan

[6] Laila Puteri Aryanto et al., "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Selama Pandemi Covid-19," *Diversity Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 4, no. 1 (2024): 27–35, https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i1.15616.

[7] Albino Barrera, "Christian Economic Ethics," in *The Oxford Handbook of Religion and Economic Ethics* (Oxford University Press, 2024), 181–216, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192894328.013.5.

[8] Kwabena Opuni-Frimpong, "A Critical Analysis of the Ghanaian Context, Experience and Perspectives of Public Theology," *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, 2023, 947–56, https://doi.org/10.38159/ehass.2023484.

sosial.[9] Keadilan sosial dan ekonomi merupakan misi Allah dalam kehidupan umat manusia. Maka, perlu adanya tindakan manusia yang bersinergi dengan tindakan ilahi untuk mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan kebijakan untuk menangani kelangkaan minyak goreng dan gas. Bagaimana kebijakan tersebut dikritisi dari perspektif teologi Kristen? Wacana teologis Kristen menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan, terutama mengenai alokasi sumber daya. Kebijakan yang diberlakukan oleh entitas pemerintah yang tidak secara efektif membatasi praktik penimbunan atau eksploitasi pasar dapat ditafsirkan sebagai pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar ini.[10] Alokasi sumber daya yaitu minyak dan elpiji 3 kg perlu untuk dikerjakan dalam prinsip keadilan dan kesetaraan. Distribusi minyak dan elpiji 3kg perlu dilakukan dengan teliti dan adil serta setara. Di satu sisi, perspektif teologi Kristen dapat memberikan implikasi etis untuk kebijakan ekonomi yang lebih adil. Implikasi etis dan teologis apa yang dapat ditawarkan untuk kebijakan ekonomi yang lebih adil? Dube menegaskan bahwa doktrin teologis, terutama dalam tradisi Kristen, menggarisbawahi kerangka etika yang mengangkat keadilan, kesetaraan, dan harmoni. Sudut pandang ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Yesus dari Nazaret, yang memperjuangkan paradigma ekonomi yang adil.[11] Kerangka etika yang dibalut kuat dengan keadilan, kesetaraan serta harmoni harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, kebijakan dan regulasi ekonomi terutama dalam distribusi minyak goreng dan elpiji 3kg tidak akan membahayakan masyarakat yang membutuhkan secara tepat.

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap konsep keadilan ekonomi dalam perspektif teologi Kristen. Selain itu, ada kritik yang disusun dengan sasaran kebijakan pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng dan gas dari sudut pandang teologi Kristen. Lebih lanjut lagi, teologi Kristen juga dapat memberikan alternatif kebijakan yang berbasis nilai-nilai keadilan. Penulis mengingat problematika hal tersebut serta penelitian sebelumnya tentang permasalahan minyak goreng[12], permasalahan gas[13] serta kebijakan ekonomi Indonesia untuk mencegah kelangkaan barang[14], masih ada celah untuk diteliti dalam perspektif teologi Kristen. Penulis menyatakan bahwa teologi Kristen memberikan sebuah perspektif mengenai keadilan ekonomi dimana perspektif teologis tersebut memberikan kritik kepada kebijakan pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng dan gas. Tulisan ini menawarkan alternatif kebijakan keadilan ekonomi dalam perspektif teologi Kristen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan data yang rumit melalui agregasi catatan akademik, dan catatan kualitatif lainnya, di samping pengamatan metodis terhadap

[9] Jonas S. Thinane, "Missio Hominum for Social Justice in South Africa: From Missio Dei to Missio Hominum," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (November 2021), https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.7109.

[10] Helen Aulia Permata Hati, Hamzah Hamzah, and Yusdiyanto Yusdiyanto, "Analysis of Cooking Oil Shortage Due to Hoarding in the Perspective of Consumer Protection Law," *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 01 (2024), https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i01-100.

[11] Zorodzai Dube, "Voicing God: Theological Injunction to Economic Issues," *Verbum Et Ecclesia* 38, no. 3 (2017): 67–76, https://doi.org/10.4102/VE.V38I3.1622.

[12] Andi Nova Bukit et al., "Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi," *Jurnal Justisia* 7, no. 1 (2022): 61, https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13212.

[13] Tempo, "Fakta-Fakta Kelangkaan Gas LPG 3 Kg," www.tempo.co, 2025, https://www.tempo.co/arsip/fakta-fakta-kelangkaan-gas-lpg-3-kg-1201938.

[14] Rizky Ramadini Febrinda, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng," *Trade Policy Journal* 1, no. 1 (2022): 25–32.

perilaku mereka, dengan tujuan mencapai pemahaman komprehensif tentang fenomena yang sedang diselidiki.15 Untuk meraih data-data kualitatif non numerik, penulis menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan pendekatan terstruktur untuk pengadaan informasi terkait melalui penilaian beragam sumber daya, seperti jurnal akademik, artikel ilmiah, dan materi elektronik yang terdiri dari komponen tekstual, visual, dan multimedia. Aset ini sangat penting dalam membangun dasar yang kuat untuk penyelidikan dan evaluasi ilmiah.[16] Penulis menggunakan data seperti literatur teologi Kristen tentang keadilan ekonomi, dokumen kebijakan pemerintah, portal berita dan penelitian terdahulu terkait distribusi minyak goreng dan gas. Penulis melakukan pendekatan teologis untuk memahami Alkitab terkait keadilan ekonomi. Penulis juga melakukan pendekatan kritik kebijakan untuk menilai dampak kebijakan ekonomi pemerintah terhadap kesejahteraan sosial dalam perspektif teologi Kristen.

PEMBAHASAN

Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Teologi Kristen

Teologi Kristen memberikan sebuah perspektif keadila ekonomi. Perspektif keadilan ekonomi tersebut berasal dari dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, para nabi perjanjian lama menegaskan keadilan yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah. Mirakhor dan Askari menyatakan bahwa para nabi, termasuk Nuh, Abraham, dan Musa, menekankan keadilan sebagai kepatuhan terhadap hukum ilahi. Keadilan ini tidak hanya spiritual tetapi juga sosial dan ekonomi, bertujuan melindungi hak-hak orang miskin, janda, dan anak yatim piatu, dan memastikan bahwa penguasa dan hakim menerapkan keadilan dengan adil.[17] Keadilan ekonomi yang dikerjakan merupakan bentuk tunduk kepada Allah. Tujuan dari keadilan tersebut ialah memberikan perlindungan. Petugas hukum serta penguasa juga harus berlaku adil dan menerapkan keadilan. Selain itu, Alkitab di dalam Imamat 25 memperkenalkan sebuah konsep untuk menghindari monopoli kekayaan. Titus menegaskan bahwa Imamat 25 memperkenalkan konsep Yubileum, sebuah sistem yang dirancang untuk mencegah akumulasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang dengan mengamanatkan pelepasan hutang secara berkala dan pengembalian properti. Sistem ini mencerminkan kepedulian ilahi terhadap keseimbangan ekonomi dan keadilan.[18] Dengan kata lain, Imamat 25 menegaskan bahwa adanya pencegahan terhadap akumulasi kekayaan yang dikelola untuk kepentingan pribadi tanpa mengindahkan kepentingan bersama. Pencegahan tersebut merupakan sebuah tindakan yang tegas sebagai ekspresi kepatuhan kepada Allah. Lebih lanjut lagi, Amsal 11:1 menegaskan sebuah prioritas mengenai keadilan serta integritas. Mott dan Sider menyatakan bahwa Konsep keadilan ekonomi dalam Amsal 11:1 menantang sistem ekonomi modern untuk memprioritaskan keadilan dan integritas. Ini menyerukan evaluasi ulang praktik ekonomi untuk memastikan mereka selaras dengan

[15] Anugerah Ayu Sendari, "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah," *Ilustrasi Penelitian*, 2019.

[16] Riska Aprilliah and Edi Supratman, "Sistem Informasi Pusat Karir Dan Tracer Study Pada Universitas Bina Darma Berbasis Android," *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi* 4, no. 2 (2022): 63–75, https://doi.org/10.31849/zn.v4i2.10664.

[17] Abbas Mirakhor and Hossein Askari, "Conception of Justice: Pre-Axial—Noah, Abraham and Moses," in *Conceptions of Justice from Earliest History to Islam* (Palgrave Macmillan, New York, 2019), 97–114, https://doi.org/10.1057/978-1-137-54303-5_5.

[18] P. Joseph Titus, "Holiness School's Response to Economic Injustice: Reading Leviticus 25 in the Multi-Religious and Cultural Context of India," in *Encountering Diversity in Indian Biblical Studies: A Biblical Masala* (Routledge eBooks, 2023), 137–48, https://doi.org/10.4324/b23220-7.

standar etika dan moral.[19] Perlu ada sebuah evaluasi ulang dalam praktek ekonomi dan hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Evaluasi ulang ekonomi dilakukan agar kegiatan ekonomi sesuai dengan standar moral dan etika. Hal tersebut mencegah adalah praktek ekonomi yang melawan moral. Di satu sisi, dalam perjanjian baru terutama di dalam Matius ditegaskan bahwa citra ekonomi berfungsi untuk mempertegas kebenaran rohani. Eubank menyatakan bahwa injil Matius terutama dalam Matius 25:31-46 sering menggunakan citra ekonomi untuk menyampaikan kebenaran rohani, menunjukkan bahwa tindakan ekonomi memiliki makna spiritual. Perumpamaan tentang domba dan kambing adalah contoh utama, di mana keadilan ekonomi digambarkan sebagai kriteria untuk hadiah atau hukuman kekal.[20] Citra ekonomi melalui perspektif Matius 25:31-46 menegaskan tentang bagaimana keadilan ekonomi harus didistribusikan dengan cara yang tepat. Penyelewengan distribusi ekonomi akan berdampak pada kekekalan. Maka dari itu, Alkitab memberikan konsep keadilan ekonomi dimana bagian Alkitab seperti Imamat 25, Amsal 11:1 dan Matius 25:31-46 menyuarakan keadilan ekonomi serta tanggung jawab bagi kaum miskin.

Keadilan sosial juga dapat diterapkan melalui ajaran Gereja. Gereja perlu untuk mengambil peran aktif dalam mengajarkan keadilan sosial. Gereja harus menekankan kepedulian terhadap kaum miskin. Gereja juga perlu untuk mengajarkan prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas memiliki pengaruh pada tanggung jawab ekonomi secara efektif. Jones menyatakan bahwa prinsip subsidiaritas sangat penting dalam mempromosikan otonomi dan tanggung jawab, memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan unik mereka secara efektif. Ini juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur struktur sosial dan politik, memastikan bahwa kekuasaan tidak terlalu tersentralisasi.[21] Saat gereja mengajarkan prinsip tentang subsidiaritas, maka gereja terlibat sebagai elemen masyarakat untuk mempromosikan otonomi serta tanggung jawab. Hal ini memberikan konsekuensi positif dimana kekuasaan tidak terlalu tersentralisasi serta adanya pengawasan langsung melalui lapisan masyarakat guna menjaga keadilan sosial. Selain itu, solidaritas merupakan elemen penting dalam menjaga keadilan sosial. Solidaritas perlu diajarkan di dalam Gereja sebagai bagian dari lapisan masyarakat. Rugani menyatakan bahwa solidaritas adalah prinsip yang menggarisbawahi saling ketergantungan semua manusia dan kewajiban moral untuk saling mendukung. Ini berakar pada pengakuan kemanusiaan bersama dan mengejar kebaikan bersama.[22] Solidaritas menegaskan tentang adanya ketergantungan dan kewajiban moral untuk saling mendukung. Solidaritas memberikan penguatan terhadap kepedulian masing-masing individu masyarakat agar mengejar kebaikan bersama, bukan kebaikan golongan. Saat gereja mendidik jemaat untuk memiliki rasa solidaritas, maka jemaat sebagai elemen masyarakat akan tergugah rasa solidaritasnya demi mencapai keadilan sosial yang bertanggung jawab. Lebih lanjut lagi, Gereja juga harus mengajarkan makna kepedulian terhadap kaum miskin. White menyatakan bahwa kepedulian terhadap kaum miskin menekankan tanggung jawab moral untuk mendukung dan mengangkat mereka yang terpinggirkan, memastikan bahwa hak dan martabat mereka ditegakkan. Prinsip ini sering dimanifestasikan dalam kebijakan dan

[19] Stephen Charles Mott and Ronald J Sider, "Economic Justice: A Biblical Paradigm," *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* 17, no. 2 (2000): 50–63, https://doi.org/10.1177/026537880001700202.

[20] Nathan Paul Eubank, "Wages of Righteousness: The Economy of Heaven in the Gospel of Matthew," *PhD Diss., Duke University* (2012).

[21] Patrick Auer Jones, "Social Justice and Subsidiarity: Luigi Taparelli and the Origins of Modern Catholic Social Thought by Thomas C. Behr (Review)," *Nova et Vetera* 21, no. 3 (2023): 1101–6, https://doi.org/10.1353/nov.2023.a919240.

[22] Marc V. Rugani, "Capabilities, Rights, and Responsibilities: Insights from Catholic Social Teaching," *Journal of Human Development and Capabilities* 24, no. 3 (2023): 359–74, https://doi.org/10.1080/19452829.2023.2227106.

tindakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan mempromosikan keadilan sosial.[23] Saat gereja menekankan kepedulian bagi kaum miskin, maka jemaat sebagai elemen masyarakat akan memiliki kesadaran bersama untuk memperhatikan kaum miskin demi pengurangan kemiskinan. Jemaat dapat terlibat di dalam aksi-aksi sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut terjadi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat orang miskin sebagai manusia untuk mencapai keadilan sosial. Maka dari itu, prinsip keadilan sosial seperti subsidiaritas, solidaritas dan kepedulian terhadap kaum miskin perlu diajarkan di gereja dan gereja memegang andil aktif untuk mendidik jemaat memiliki kesadaran akan keadilan sosial.

Keadilan ekonomi pernah terimplementasikan dalam sejarah gereja. Gereja membawa sebuah gerakan sosial untuk menegakkan keadilan ekonomi. Salah satu sejarah gereja dalam perspektif keadilan sosial pernah terjadi dalam zaman perjanjian baru. Barrera menegaskan bahwa ajaran Kristen awal, sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Baru, memperingatkan terhadap penyembahan berhala kekayaan dan menekankan pengelolaan dan kasih sayang timbal balik sebagai pusat kehidupan ekonomi.[24] Jemaat di zaman perjanjian baru memiliki penegasan terhadap kekayaan. Kekayaan bukan lagi dipandang sebagai sebuah pengejaran atau bahkan pemujaan. Namun, kekayaan dikelola dengan penuh kasih demi kepentingan bersama. Hal tersebut dilakukan oleh jemaat perjanjian baru. Selain itu, doktrin sosial Kristen memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebijakan sosial ekonomi. Galiev menegaskan bahwa doktrin sosial Kristen secara historis mempengaruhi kebijakan sosial-ekonomi, mengadvokasi ekonomi pasar sosial dan distribusi sumber daya yang adil. Doktrin ini menekankan pentingnya kemitraan sosial dan keseimbangan antara tenaga kerja dan modal, mempromosikan mekanisme seperti tanggung jawab sosial dan perlindungan karyawan.[25] Doktrin sosial Kristen memberikan pengaruh yang kuat dalam membentuk ekonomi pasar sosial. Distribusi sumber daya menjadi adil akibat doktrin ini. Doktrin sosial Kristen memberikan penguatan terhadap kemitraan sosial dalam rangka mencapai keseimbangan. Keseimbangan tersebut ialah keseimbangan antara tenaga kerja dan modal. Keseimbangan tersebut terjadi dalam rangka memperkuat tanggung jawab sosial serta melindungi karyawan. Maka dari itu, keadilan ekonomi dalam sejarah gereja dan gerakan sosial Kristen pernah menciptakan sebuah gerakan keadilan yang berbasiskan ekonomi demi kepentingan orang banyak.

Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Kelangkaan Minyak Goreng dan Gas

Pemerintah telah membangun sebuah kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng serta gas. Pemerintah menyusun regulasi berkenaan dengan subsidi dan distribusi minyak goreng dan gas dalam konteks ekonomi nasional. Efendi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerapkan subsidi dan larangan ekspor untuk menstabilkan harga minyak goreng, membuatnya lebih terjangkau bagi konsumen.[26] Pemerintah Indonesia melakukan sebuah larangan ekspor minyak goreng dan gas. Larangan ini diharapkan dapat membawa harga minyak dan gas menjadi terjangkau. Selain larangan tersebut, pemerintah juga melakukan subsidi minyak. Subsidi ini juga diharapkan dapat membuat konsumen

[23] Rachel Johnston-White, "Catholic Conceptions of Social Justice from 1891 to Pope Francis," in *Social Justice in Twentieth-Century Europe* (Cambridge University Press, 2024), 53–77, https://doi.org/10.1017/9781009370868.003.

[24] Barrera, "Christian Economic Ethics."

[25] G T Galiev et al., "Socio-Political Audit of Christian Social Doctrine," *Vestnik UGNTU. Nauka, Obrazovanie, Èkonomika. Seriâ Èkonomika* 2, no. 40 (2022): 7–15, https://doi.org/10.17122/2541-8904-2022-2-40-7-15.

[26] Mohamad Nur Efendi et al., "The Effort of The Government and Its Impact on Maintaining the Stability of Cooking Oil Prices," *Fenomena* 23, no. 1 (2024): 53–70, https://doi.org/10.35719/fenomena.v23i1.160.

mendapatkan minyak dan gas secara mudah dengan harga yang murah. Namun, regulasi dan kebijakan tersebut justru menimbulkan dampak yang besar dalam perspektif ekonomi keadilan. Ada sebuah dampak kebijakan pemerintah yang langsung terkena kepada masyarakat. Kondisi harga minyak yang meroket membuat pemerintah harus mengeluarkan beberapa kebijakan. Pemerintah berusaha menekan harga minyak dengan menggunakan metode subsidi agar harga minyak dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Dalam hal ini, terdapat masalah yang signifikan di dalam distribusi yang tidak adil. Ada ketidakadilan yang cukup besar dalam dinamika rantai distribusi minyak, di mana produsen dan distributor terlibat dalam kontes kepentingan yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, minyak berfungsi sebagai intervensi pemerintah yang bertujuan memperbaiki distribusi minyak goreng, yang sudah tunduk pada peraturan ketat tentang harga eceran maksimumnya. Khususnya, sebagaimana dibuktikan dengan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO), produksi Minyakita telah mencapai output bulanan sebesar 213.988 ton, sedangkan permintaan minyak goreng kemasan sederhana dan curah hanya 170.000 ton per bulan. Ini menunjukkan bahwa persediaan yang tersedia melampaui persyaratan nasional sebesar 125%.[27] Ada kepentingan yang tidak seimbang antara produsen dan distributor. Kepentingan tersebut membuat kuota minyak goreng yang semestinya diprediksi akan cukup, namun justru menjadi langka dengan harga yang meroket. Maka dari itu, permasalahan yang terjadi di dalam kebijakan pemerintah terkait minyak goreng dan gas ialah adanya permasalahan distribusi serta pengawasan distribusi yang tidak tepat sehingga menyebabkan harga bahan tersebut menjadi meroket serta membuat bahan yang dibutuhkan orang banyak menjadi langka.

Kelangkaan gas elpiji 3 kg juga terjadi di awal-awal tahun 2025. Kelangkaan tersebut diakibatkan karena keputusan kebijakan pemerintah. Dilansir melalui Kompas.com, pemerintah menerapkan sebuah kebijakan dimana penjualan elpiji 3 kg harus terpusat kepada pangkalan.[28] Kebijakan pemerintah tersebut membawa permasalahan yang baru di ranah masyarakat. Gas elpiji 3kg menjadi langka dan terjadi penumpukan antrean di berbagai pangkalan gas di Indonesia.[29] Kebijakan pemerintah untuk memusatkan penjualan elpiji 3kg dirasa tidak tepat karena dengan memusatkan penjualan gas elpiji 3kg di pangkalan gas, maka penjual gas elpiji 3kg akan mengalami kerugian. Fahmi Rahdi, seorang pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada mengemukakan analisanya melalui Kompas.com bahwa kebijakan pemerintah tersebut akan mematikan warung-warung yang menjadi pengejer elpiji.[30] Melalui fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan elpiji 3kg yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan imbas dari kebijakan pemerintah untuk memusatkan penjualan elpiji 3kg di pangkalan gas Indonesia.

Kritik Teologis terhadap Kebijakan Pemerintah

Distribusi yang tidak seimbang merupakan bentuk ketidak adilan ekonomi dalam perspektif Kristen. Distribusi yang tidak seimbangjuga merupakan penyelewengan ekonomi dalam perspektif Kristen. Iman Kristen memiliki ketegasan yang kuat mengenai tanggung jawab. Ciftci menyatakan bahwa tradisi Kristen, meskipun tidak secara eksplisit membahas

[27] Kementerian Perdagangan RI, "Mafia Minyakita Akhirnya Terbongkar, Produsen Dan Distributor Terlibat," https://www.kemendag.go.id, 2025, https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mafia-minyakita-akhirnya-terbongkar-produsen-dan-distributor-terlibat.

[28] Kompas.com, "Kelangkaan Elpiji 3 Kg Dan BBM Di Indonesia, Pakar Ungkap Penyebabnya," 2025, https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/02/04/062600988/kelangkaan-elpiji-3-kg-dan-bbm-di-indonesia-pakar-ungkap-penyebabnya?page=all.

[29] Tempo.com, "Fakta-Fakta Kebijakan Distribusi Elpiji 3 Kg: Pelarangan, Kelangkaan Hingga Subpangkalan," 2025.

[30] Kompas.com, "Kelangkaan Elpiji 3 Kg Dan BBM Di Indonesia, Pakar Ungkap Penyebabnya," 2025.

monopoli, menekankan tanggung jawab moral untuk mencegah praktik-praktik yang mengarah pada ketidakadilan ekonomi. Ini termasuk mengadvokasi sistem yang mempromosikan persaingan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir orang.[31] Perlu adanya tanggung jawab yang besar untuk mencegah ketidak adilan distribusi serta praktik monopoli. Sistem distribusi yang dibangun harus ditegakkan dengan pengawasan yang ketat agar keadilan sosial terjadi. Pengawasan ketat terhadap distribusi dapat mencegah adanya monopoli demi menguntungkan segelintir pihak. Selain itu etika Kristen memberikan perspektif yang jelas terhadap distribusi yang tidak bertanggung jawab. Etika Kristen menggarisbawahi perlu ada sebuah keprihatinan bagi kaum yang kekurangan. Santos dan Laczniak menyatakan bahwa etika sosial Kristen menekankan pentingnya memperlakukan orang miskin dan kurang beruntung secara adil dalam ekonomi pasar. Ini termasuk memastikan bahwa sistem ekonomi tidak mengeksploitasi kelompok-kelompok ini.[32] Etika Kristen menekankan ketegasan ekonomi sebagai alat penjangkau dan penolong kaum miskin. Sistem ekonomi tidak bisa dikerjakan dengan sembarangan demi mengeksploitasi kaum-kaum miskin. Maka dari itu, perspektif Kristen memberikan sebuah pandangan bagaimana semestinya distribusi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian demi mencegah monopoli dan demi menolong pihak-pihak miskin.

Keadilan distributif perlu ditegakkan untuk mencegah kelangkaan minyak goreng dan gas. Perlu adanya keadilan distributif dan komutatif dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintah agar tidak terjadi ketidakadilan sosial. Lollar menegaskan bahwa distribusi sumber daya yang tidak merata dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi pada orang miskin dan mempromosikan ketidakkesetaraan.[33] Perlu adanya distribusi yang rata dan adil untuk mencapai keadilan ekonomi. Tanpa adanya distribusi yang rata dan adil, maka kaum miskin menjadi korbannya. Dengan demikian, terjadilah ketidaksetaraan di dalam negara ini.

Dalam konteks keadilan distributif, pemerintah perlu menerapkan distribusi yang adil dan merata agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat. Selain itu, perlu ada kebijakan pemerintah yang menegakkan keadilan dalam praktek perdagangan. Islar menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang menegakkan praktik perdagangan yang adil, undang-undang perlindungan konsumen, dan langkah-langkah anti-korupsi berakar pada keadilan komutatif. Kebijakan ini membantu menjaga kepercayaan dalam transaksi ekonomi dan mencegah eksploitasi.[34] Praktik perdagangan perlu diatur dalam kerangka tanggung jawab moral dan etis demi mencapai keadilan sosial. Konsumen juga perlu dilindungi haknya dan juga perlu adanya langkah anti korupsi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan dipercaya oleh publik dan eksploitasi dapat dicegah. Maka dari itu, diperlukan adanya keadilan distributif dan komutatif dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintah.

Etika Kepemimpinan Kristen memiliki hubungan erat dengan Teologi Kristen. Jakobsen menyatakan bahwa teologi Kristen memperkuat sifat etis pemimpin untuk dapat beradaptasi dengan kondisi yang berubah dan menemukan solusi inovatif untuk masalah

---

[31] Mehmet Ciftci, "Religion and Socio-Economic Injustice," in *The Oxford Handbook of Religion and Economic Ethics* (Oxford University Press, 2024), 629–42, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192894328.013.31.

[32] Nicholas J C Santos and Gene R Laczniak, "Just Markets from the Perspective of Catholic Social Teaching," *Journal of Business Ethics* 89, no. 1 (2009): 29–38, https://doi.org/10.1007/S10551-008-9908-8.

[33] Xia Li Lollar, "The Impact of Government Corruption and Monopolized Industries on Poverty and Income Disparity in Urban China," *Asian Politics and Policy* 1, no. 3 (July 2009): 526–42, https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01138.x.

[34] Mine Islar, "Distributive Justice at the Global, National, and Temporal Scales" (Springer Nature, 2021), 1–10, https://doi.org/10.1007/978-3-319-71066-2_24-1.

yang kompleks.[35] Etika kepemimpinan Kristen memberikan penguatan terhadap pengambilan kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Etika Kristen memberikan penegasan terhadap kebijakan ekonomi yang berasal dari Alkitab. Barrera menyatakan bahwa etika ekonomi Kristen mengambil dari ajaran alkitabiah, menekankan pengelolaan, akuntabilitas, dan kasih sayang sebagai pusat kehidupan ekonomi. Prinsip-prinsip ini membimbing para pemimpin untuk memprioritaskan kebaikan bersama dan pertumbuhan manusia daripada keuntungan ekonomi belaka.[36] Etika Kristen menekankan pengelolaan yang bertanggung jawab. Pengelolaan tersebut didasarkan atas dasar kasih sayang untuk kebaikan bersama. Prinsip tersebut dapat diambil oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan untuk menekankan kebaikan bersama. Selain itu, para pemimpin perlu untuk memiliki nilai etika yang dipegang teguh di dalam pertimbangannya untuk membuat kebijakan ekonomi. Senathip, Mujtaba, Cavico menegaskan bahwa para pemimpin didorong untuk mengintegrasikan pertimbangan etis ke dalam pembuatan kebijakan ekonomi, mempromosikan kebijakan yang berkelanjutan dan adil. Ini melibatkan perspektif jangka panjang yang mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan sumber daya.[37] Saat para pemimpin memiliki pertimbangan etis, maka kebijakan yang diputuskan akan memiliki keberlanjutan yang positif. Pertimbangan etis membuat keputusan dan kebijakan yang diambil berdampak secara panjang. Maka dari itu, etika kepemimpinan Kristen memberikan penguatan dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dengan mempertimbangkan pengelolaan, akuntabilitas dan kasih sayang serta pertimbangan etis bagi pemerintah.

Alternatif Kebijakan Ekonomi Berbasis Teologi Kristen

Distribusi berbasis keadilan dan kesejahteraan umum harus dikerjakan bagi pemerintah. Hal tersebut dapat membawa prinsip keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Nicklisch dan Paetzel menegaskan bahwa keadilan berbasis kebutuhan menekankan redistribusi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, yang dapat meningkatkan produktivitas tanpa kehilangan efisiensi yang signifikan.[38] Keadilan dalam distribusi dapat meningkatkan nilai produktivitas di dalam kehidupan masyarakat. Distrbusi yang adil adalah mencegah monopoli dari satu pihak. Pencegahan monopoli tersebut terjadi dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi yang sehat. Untuk mencapai model distribusi yang adil, pendekatan etis-teologis dapat dikerjakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Shevkunov menyatakan bahwa nilai-nilai etika Kristen diintegrasikan ke dalam metodologi ekonomi, menunjukkan bahwa hukum spiritual dan peningkatan kehidupan spiritual dapat mendukung pembangunan ekonomi.[39] Nilai etika Kristen menegaskan bahwa saat pemangku kebijakan memiliki kesadaran spiritual, maka hal tersebut akan membawa pemangku kebijakan menyusun kebijakan dengan penuh etika. Nilai spiritual perlu dikembangkan agar penyusunan kebijakan terjadi dalam takut akan Tuhan. Selain itu, prinsip-prinsip alkitab juga dapat dikembangkan untuk membangun kebijakan ekonomi. Shankle menyatakan bahwa

[35] Martin Jakobsen, "Christian Improvisation," *Scandinavian Journal for Leadership and Theology* 10 (2023): 593–604, https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.93.

[36] Barrera, "Christian Economic Ethics."

[37] Tipakorn Senathip, Bahaudin G. Mujtaba, and Frank J. Cavico, "Policy-Making Considerations for Ethical and Sustainable Economic Development," *Economy* 4, no. 1 (2017): 7–14, https://doi.org/10.20448/journal.502.2017.41.7.14.

[38] Andreas Nicklisch and Fabian Paetzel, "Need-Based Justice and Distribution Procedures: The Perspective of Economics," in *Need-Based Distributive Justice: An Interdisciplinary Perspective* (Springer, Cham, 2020), 161–89, https://doi.org/10.1007/978-3-030-44121-0_6.

[39] Nikolay Shevkunov et al., "Formation of Spiritual and Moral Ideology and Methodology of Innovative Economic Development," *E3S Web of Conferences* 135 (2019): 1104, https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913501104.

doktrin Kristen membangun fondasi untuk kebijakan ekonomi melalui prinsip-prinsip alkitabiah yang menginformasikan pilihan keuangan dan moneter, menyoroti kesetaraan dan kasih sayang bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi.[40] Mempelajari Alkitab dapat memberikan manfaat untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak bagi mereka yang tidak beruntung. Dengan demikian, keadilan sosial dapat tercapai dan distribusi yang adil dapat dilakukan. Maka dari itu, model distribusi berbasis keadilan dan kesejahteraan umum dapat tercapai apabila dilakukan dengan jalan pendekatan etis teologis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Gereja dapat berperan aktif dalam advokasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan keadilan Kristen. Advokasi gereja dalam kebijakan ekonomi berasal dari ajaran Alkitab. Garber menegaskan bahwa advokasi gereja untuk keadilan ekonomi berakar kuat dalam ajaran Alkitab. Perjanjian Lama, misalnya, berisi banyak referensi tentang keadilan ekonomi, menekankan hak-hak orang yang tertindas secara ekonomi dan menyerukan kembalinya prinsip-prinsip Alkitab untuk menghadapi ketidakadilan ekonomi saat ini.[41] Gereja memberikan advokasi sesuai dengan kebenaran Alkitab untuk menfasilitasi keadilan sosial. Gereja dapat membantu orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi untuk menikmati keadilan ekonomi. Selain itu, Gereja juga dapat terlibat dalam mengatasi kebutuhan yang urgent. Strohm menegaskan bahwa gereja harus berkomitmen untuk mengatasi kebutuhan yang terpinggirkan dan mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan distribusi sumber daya yang adil.[42] Gereja juga dapat memberikan bantuan kebutuhan dalam hal ini minyak goreng dan gas untuk mendistribusikan barang yang sedang langka tersebut. Dalam hal ini gereja melakukan komitmennya untuk membantu kaum-kaum terpinggirkan agar memperoleh keadilan sosial. Maka dari itu, gereja dapat memberikan advokasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan keadilan Kristen bagi masyarakat yang terpinggirkan.

KESIMPULAN

Kelangkaan elpiji dan minyak terjadi di negara Indonesia. Kelangkaan tersebut terjadi akibat adanya ketidakadilan yang cukup besar dalam dinamika rantai distribusi. Produsen dan distributor terlibat dalam kepentingan yang tidak seimbang sehingga apa yang semestinya dapat dinikmati secara adil kemudian menjadi timpang secara ekonomi. Hal tersebut perlu dikritisi agar pemerintah dapat meregulasi distribusi yang adil dan bertanggung jawab. Teologi Kristen memberikan sumbangsih pemikiran untuk melakukan distribusi yang adil, teliti dengan penuh tanggung jawab. Distribusi minyak goreng dan gas dikerjakan dengan pengawasan yang tinggi serta diawasi oleh lapisan masyarakat guna mencegah dominasi pihak-pihak yang dapat merugikan kepentingan bersama. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah melibatkan pihak-pihak netral seperti gereja untuk dapat melakukan pengawasan secara seksama dalam pengawasan distribusi minyak goreng dan gas. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan juga perlu memperhatikan nilai etis dan moral saat mengambil kebijakan agar tercapainya keadilan sosial. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala serta melibatkan rakyat untuk dapat mencapai kebijakan yang bermoral dan beretika tanpa menyulitkan pihak masyarakat. Gereja juga

[40] David Shankle, "Biblical Economic Policy: Ten Scriptural Truths for Fiscal and Monetary Decision-Making," *Journal of Biblical Integration in Business* 25, no. 1 (2022), https://doi.org/10.69492/jbib.v25i1.628.

[41] Garber, "Justice or Wormwood: Foundations for Economic Justice in the Old Testament."

[42] Heinrich Bedford-Strohm, "Food Justice and Christian Ethics," *Verbum Et Ecclesia* 33, no. 2 (2012): 1–6, https://doi.org/10.4102/VE.V33I2.768.

dapat terlibat untuk mengadvokasi keadilan sosial dengan membantuk masyarakat yang terpinggirkan. Maka dari itu, teologi Kristen memberikan persepktif yang benar dalam keadilan ekonomi guna memberikan kritik bagi kebijakan pemeritah terkait kelangkaan minyak goreng dan gas pada masa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, Samuel L. "The Justice Imperative in Scripture." *Interpretation* 69, no. 4 (2015): 399–414. https://doi.org/10.1177/0020964315592131.

Anugerah Ayu Sendari. "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah." *Ilustrasi Penelitian*, 2019.

Aryanto, Laila Puteri, Mita Adinda, Nolasita Anggreny, and RIRI LESTARI. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Selama Pandemi Covid-19." *Diversity Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 4, no. 1 (2024): 27–35. https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i1.15616.

Barrera, Albino. "Christian Economic Ethics." In *The Oxford Handbook of Religion and Economic Ethics*, 181–216. Oxford University Press, 2024. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192894328.013.5.

Bedford-Strohm, Heinrich. "Food Justice and Christian Ethics." *Verbum Et Ecclesia* 33, no. 2 (2012): 1–6. https://doi.org/10.4102/VE.V33I2.768.

Bukit, Andi Nova, Uswatun Hasanah, Khairun Na'im, and Elyani Elyani. "Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi." *Jurnal Justisia* 7, no. 1 (2022): 61. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13212.

Ciftci, Mehmet. "Religion and Socio-Economic Injustice." In *The Oxford Handbook of Religion and Economic Ethics*, 629–42. Oxford University Press, 2024. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192894328.013.31.

Dube, Zorodzai. "Voicing God: Theological Injunction to Economic Issues." *Verbum Et Ecclesia* 38, no. 3 (2017): 67–76. https://doi.org/10.4102/VE.V38I3.1622.

Efendi, Mohamad Nur, Shaharudin Shah Che Hamzah, Selvina Khomairoh, and Nurul Izzati Septiana. "The Effort of The Government and Its Impact on Maintaining the Stability of Cooking Oil Prices." *Fenomena* 23, no. 1 (2024): 53–70. https://doi.org/10.35719/fenomena.v23i1.160.

Eubank, Nathan Paul. "Wages of Righteousness: The Economy of Heaven in the Gospel of Matthew." *PhD Diss., Duke University*, 2012.

Febrinda, Rizky Ramadini. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng." *Trade Policy Journal* 1, no. 1 (2022): 25–32.

Galiev, G T, I Z Gimaev, T V Grishina, and T R Gimaev. "Socio-Political Audit of Christian Social Doctrine." *Vestnik UGNTU. Nauka, Obrazovanie, Èkonomika. Seriâ Èkonomika* 2, no. 40 (2022): 7–15. https://doi.org/10.17122/2541-8904-2022-2-40-7-15.

Garber, David G. "Justice or Wormwood: Foundations for Economic Justice in the Old Testament." *Review & Expositor* 110, no. 2 (2013): 271–83. https://doi.org/10.1177/003463731311000209.

Islar, Mine. "Distributive Justice at the Global, National, and Temporal Scales," 1–10. Springer Nature, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71066-2_24-1.

Jakobsen, Martin. "Christian Improvisation." *Scandinavian Journal for Leadership and Theology* 10 (2023): 593–604. https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.93.

Johnston-White, Rachel. "Catholic Conceptions of Social Justice from 1891 to Pope Francis." In *Social Justice in Twentieth-Century Europe*, 53–77. Cambridge University

Press, 2024. https://doi.org/10.1017/9781009370868.003.

Jones, Patrick Auer. "Social Justice and Subsidiarity: Luigi Taparelli and the Origins of Modern Catholic Social Thought by Thomas C. Behr (Review)." *Nova et Vetera* 21, no. 3 (2023): 1101–6. https://doi.org/10.1353/nov.2023.a919240.

Kompas.com. "Kelangkaan Elpiji 3 Kg Dan BBM Di Indonesia, Pakar Ungkap Penyebabnya." www.kompas.com, 2025. https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/02/04/062600988/kelangkaan-elpiji-3-kg-dan-bbm-di-indonesia-pakar-ungkap-penyebabnya?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bottom_Desktop.

———. "Kelangkaan Elpiji 3 Kg Dan BBM Di Indonesia, Pakar Ungkap Penyebabnya," 2025. https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/02/04/062600988/kelangkaan-elpiji-3-kg-dan-bbm-di-indonesia-pakar-ungkap-penyebabnya?page=all.

Lollar, Xia Li. "The Impact of Government Corruption and Monopolized Industries on Poverty and Income Disparity in Urban China." *Asian Politics and Policy* 1, no. 3 (July 2009): 526–42. https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01138.x.

Mirakhor, Abbas, and Hossein Askari. "Conception of Justice: Pre-Axial—Noah, Abraham and Moses." In *Conceptions of Justice from Earliest History to Islam*, 97–114. Palgrave Macmillan, New York, 2019. https://doi.org/10.1057/978-1-137-54303-5_5.

Mott, Stephen Charles, and Ronald J Sider. "Economic Justice: A Biblical Paradigm." *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* 17, no. 2 (2000): 50–63. https://doi.org/10.1177/026537880001700202.

Nicklisch, Andreas, and Fabian Paetzel. "Need-Based Justice and Distribution Procedures: The Perspective of Economics." In *Need-Based Distributive Justice: An Interdisciplinary Perspective*, 161–89. Springer, Cham, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44121-0_6.

Opuni-Frimpong, Kwabena. "A Critical Analysis of the Ghanaian Context, Experience and Perspectives of Public Theology." *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, 2023, 947–56. https://doi.org/10.38159/ehass.2023484.

Ostwald, Connie Harris. "Defining Economic Justice: A Christian Perspective." *Journal of Business, Technology and Leadership* 1, no. 1 (2019): 18. https://doi.org/10.54845/btljournal.v1i1.4.

Permata Hati, Helen Aulia, Hamzah Hamzah, and Yusdiyanto Yusdiyanto. "Analysis of Cooking Oil Shortage Due to Hoarding in the Perspective of Consumer Protection Law." *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 01 (2024). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i01-100.

RI, Kementerian Perdagangan. "Mafia Minyakita Akhirnya Terbongkar, Produsen Dan Distributor Terlibat." https://www.kemendag.go.id, 2025. https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mafia-minyakita-akhirnya-terbongkar-produsen-dan-distributor-terlibat.

Riska Aprilliah, and Edi Supratman. "Sistem Informasi Pusat Karir Dan Tracer Study Pada Universitas Bina Darma Berbasis Android." *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi* 4, no. 2 (2022): 63–75. https://doi.org/10.31849/zn.v4i2.10664.

Rugani, Marc V. "Capabilities, Rights, and Responsibilities: Insights from Catholic Social Teaching." *Journal of Human Development and Capabilities* 24, no. 3 (2023): 359–74. https://doi.org/10.1080/19452829.2023.2227106.

Santos, Nicholas J C, and Gene R Laczniak. "Just Markets from the Perspective of Catholic Social Teaching." *Journal of Business Ethics* 89, no. 1 (2009): 29–38. https://doi.org/10.1007/S10551-008-9908-8.

Senathip, Tipakorn, Bahaudin G. Mujtaba, and Frank J. Cavico. "Policy-Making

Considerations for Ethical and Sustainable Economic Development." *Economy* 4, no. 1 (2017): 7–14. https://doi.org/10.20448/journal.502.2017.41.7.14.

Shankle, David. "Biblical Economic Policy: Ten Scriptural Truths for Fiscal and Monetary Decision-Making." *Journal of Biblical Integration in Business* 25, no. 1 (2022). https://doi.org/10.69492/jbib.v25i1.628.

Shevkunov, Nikolay, Anna Zigunova, Irina Logvinova, Natalya Gorkovenko, Lyudmila Kravchenko, and Natalia Gromakova. "Formation of Spiritual and Moral Ideology and Methodology of Innovative Economic Development." *E3S Web of Conferences* 135 (2019): 1104. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913501104.

Tempo.com. "Fakta-Fakta Kebijakan Distribusi Elpiji 3 Kg: Pelarangan, Kelangkaan Hingga Subpangkalan," 2025.

Tempo. "Fakta-Fakta Kelangkaan Gas LPG 3 Kg." www.tempo.co, 2025. https://www.tempo.co/arsip/fakta-fakta-kelangkaan-gas-lpg-3-kg-1201938.

Thinane, Jonas S. "Missio Hominum for Social Justice in South Africa: From Missio Dei to Missio Hominum." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (November 2021). https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.7109.

Titus, P. Joseph. "Holiness School's Response to Economic Injustice: Reading Leviticus 25 in the Multi-Religious and Cultural Context of India." In *Encountering Diversity in Indian Biblical Studies: A Biblical Masala*, 137–48. Routledge eBooks, 2023. https://doi.org/10.4324/b23220-7.